

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-21, kawasan Timur Tengah seringkali dilanda konflik, instabilitas politik dan gejolak sosial yang disebabkan oleh dinamika global. Secara historis, terdapat percaturan kekuatan antara Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet pada masa perang dingin yang memperebutkan pengaruh di kawasan ini. Kompetisi antara kedua *superpower* tersebut menyebabkan perseteruan antar negara-negara di Timur tengah khususnya pada wilayah *Fertile Crescent* yang meliputi negara Irak dan Suriah. Khususnya Irak yang menjadi negara dengan posisi yang strategis dalam percaturan perang dingin di Timur Tengah dikarenakan letak negaranya yang berada di antara Saudi Arabia dan Iran sehingga Irak menjadi *buffer state* antara keduanya. Di tengah situasi yang konfrontatif tersebut, Amerika Serikat mendukung rezim Saddam Hussein untuk membendung pengaruh Soviet maupun Iran supaya tidak masuk ke Saudi Arabia dengan mejamin kedaulatan dan keamanan negara tersebut (Byrne, tt.).

Namun pada dasarnya, kondisi keamanan Irak pada masa Saddam Hussein dapat dikatakan sebagai situasi keamanan yang semu. Hal itu disebabkan karena pada tingkat paling dasar dalam struktur politik Irak, terdapat kelompok-kelompok yang berupaya melawan sentralitas Baghdad. Misalnya, terdapat perlawanan dari kelompok Kurdi dan kelompok militan Sunni. Di wilayah Halabjah di Irak-Kurdistan, terdapat kelompok militan Ansar al-Islam (AAS) yang ingin

mengacaukan pemerintahan Saddam Hussein, namun karena kinerja dinas intelijen Saddam yang sangat efektif dan otoriternya sistem politik di Irak membuat AAS tidak mampu beroperasi dengan leluasa dan pengaruhnya berhasil diredam (Nance, 2015: 45).

Meskipun sifat dari pemerintahan Saddam yang cenderung otoriter yang bertentangan dengan prinsip demokrasi-liberalisme ala Amerika Serikat, Amerika Serikat tetap mendukungnya demi membendung pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. Setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, nilai strategis Irak dalam sudut pandang geopolitik Amerika Serikat mulai berkurang. Mengikuti perkembangan tersebut, hubungan antara Amerika Serikat dan Irak semakin meregang yang disebabkan perbedaan pandangan dan kepentingan antara keduanya di kawasan tersebut. Amerika Serikat dan Irak hanyalah sekutu transaksional pada masa perang dingin. Mengikuti perkembangan regional setelahnya, Saddam kecewa terhadap sikap Amerika Serikat yang bermain dua kaki pada masa perang Iran-Irak, yaitu mendukung Irak namun disaat yang bersamaan tidak ingin Irak menjadi negara yang terlalu kuat. Hubungan kedua negara terus memburuk hingga pada awal tahun 1990, Saddam Hussein telah menganggap seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Bush untuk memperbaiki hubungan kedua negara hanyalah retorika kosong. Bagi Saddam, sejak saat itu Amerika Serikat dianggap hanya ingin mengacaukan pemerintahannya dan menghalang-halangi rencananya mendominasi kawasan Timur Tengah (DePetris, 2018).

Serangan 9/11 di New York menjadi justifikasi utama Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer terhadap Irak. Pada tahun 2003, tuduhan kerjasama

dengan kelompok teroris dilontarkan Amerika Serikat terhadap Saddam Hussein. Tema *War on Terror* diangkat dan dipopulerkan sebagai respon Amerika Serikat terhadap peristiwa 9/11. Setelah serangan 9/11, Presiden Bush memberikan pidato di depan Kongres untuk mengumumkan rencananya memulai perang terhadap terorisme dengan strategi menyerang terlebih dahulu sebelum diserang kembali (“Chronology: The Evolution of the Bush Doctrine”, 2007). Dalam pidato di depan Kongres tersebut, Presiden Bush menyatakan bahwa militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam NATO harus bersiap-siap dalam sebuah intervensi militer terhadap Irak. “And tonight a few miles from the damaged Pentagon, I have a message for our military: Be ready. I have called the armed forces to alert, and there is a reason. This is not, however, just America’s fight. And what is at stake is not just America’s freedom. This is the world’s fight” (“Text: President Bush Addresses the Nation”, 2001).

Intervensi militer Amerika Serikat diawali dengan invasi pasukan Amerika Serikat dan koalisi multinasional terhadap Irak yang dimulai pada bulan Maret 2003 dan berlangsung selama dua bulan. Amerika Serikat dan koalisinya mengerahkan sekitar 200.000 pasukan untuk merebut Irak. Invasi tersebut dengan cepat berhasil merebut kota Baghdad, sebagian besar kota-kota di Irak dan wilayah-wilayah strategis lainnya di Irak sehingga serangan tersebut mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein beserta dominasi partai Ba’ath-nya. Setelah berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, pasukan Amerika Serikat melanjutkan intervensi militernya di Irak dalam bentuk misi anti-terorisme dan upaya pengamanan wilayah untuk mengontrol dan menjaga keamanan Irak sebelum kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan yang

baru didirikan. Namun upaya pengamanan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat tidak begitu berhasil sehingga mulai bermunculan kelompok-kelompok yang memberikan perlawanan terhadap Amerika Serikat segera setelah invasi berakhir. Dengan tidak adanya otoritas pusat yang memerintah Irak setelah pemerintahan Saddam dibubarkan, kondisi anarkis berlangsung selama beberapa minggu setelah pertempuran-pertempuran awal berakhir. Amerika Serikat kemudian menggunakan kekuatan militer untuk meredam keadaan yang tidak kondusif. Masyarakat Irak mulai memandang kehadiran pasukan Amerika Serikat secara negatif ketika pasukan Amerika Serikat tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pasca-invasi militer dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Irak di kota-kota dan desa sehingga beberapa elemen masyarakat Irak memberikan perlawanan. Selain itu, masyarakat Irak juga dikecewakan karena minimnya bantuan kemanusiaan dan lambatnya upaya rekonstruksi oleh Amerika Serikat (Abdullah, 2006: 102-103).

Kelanjutan intervensi militer Amerika Serikat pasca invasi terhadap Irak adalah dalam bentuk upaya anti-terorisme dan operasi keamanan untuk memulihkan stabilitas di Irak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Amerika Serikat menerjunkan sekitar 150.000 pasukan yang disebar di berbagai wilayah di Irak. Amerika Serikat juga memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan Irak baru yang kembali dibentuk untuk mengusahakan terciptanya kondisi yang stabil agar dapat membangun kembali pemerintahan Irak pasca-Saddam. Intervensi militer Amerika Serikat yang dilakukan setelah invasi tahun 2003 adalah dalam bentuk *peacekeeping*, *peace-enforcement*, bantuan kemanusiaan, serta *military assistance*.

Segera setelah masa pendudukan militer dimulai, mulai banyak bermunculan kelompok militan dan pemberontak yang dipimpin oleh beberapa mantan jenderal yang loyal terhadap Saddam Hussein dan keduanya putranya, seperti Jenderal Izzat Ibrahim al-Douri serta kedua putra Saddam yaitu Uday Hussein dan Qusay Hussein (Nance, 2015: 61-64).

Selain kelompok loyalis Saddam, militan-militan Sunni dan Syiah yang menentang kehadiran pasukan Amerika Serikat di Irak juga mulai bermunculan. Pada awalnya, perlawanan atas pendudukan pasukan Amerika Serikat hanya muncul dari kelompok loyalis Saddam atau partai Ba'ath, namun dengan cepat kelompok ekstrimis dan penduduk Irak yang tidak senang dengan perilaku pasukan Amerika Serikat mulai menggabungkan kekuatan dan memberikan perlawanan yang lebih berarti. Di antara organisasi-organisasi militan yang melakukan perlawanan pada masa awal fase insurgensi, yaitu terdapat *Fedayeen Saddam* yang merupakan milisi loyalis Saddam, kemudian terdapat *Jama'at al-Tawhid wal-Jihad* (TWJ) & *Jaysh al-Ansar al-Sunnah* (AAS) yang merupakan kelompok militan Sunni serta *Jaysh al-Mahdi* yang merupakan kelompok militan Syiah. Masing-masing kelompok tersebut memiliki motivasinya tersendiri seperti motif politis untuk mengembalikan kekuasaan partai Ba'ath dan Saddam maupun motivasi agama untuk mengusir pasukan asing dari negeri Muslim. Namun, mereka semua disatukan oleh satu tujuan yang sama yaitu mengusir pasukan Amerika Serikat yang dianggap sebagai penjajah di negeri mereka secara umum. Pada tahun 2006, suatu organisasi militan yang melawan pendudukan Amerika Serikat tersebut kemudian berkembang menjadi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) (Nance, 2015: 6-11).

1.2 Rumusan Masalah

Adakah korelasi antara intervensi militer Amerika Serikat tahun 2003-2011 di Irak terhadap dinamika perlawanan kelompok insurgensi? Mengapa demikian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari laporan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh intervensi militer Amerika Serikat terhadap meningkatnya dinamika perlawanan kelompok insurgensi di Irak hingga tahun 2014. Yang dimaksud dengan dinamika adalah kekuatan, pengaruh dan kemampuan suatu organisasi untuk beroperasi dan berkembang. Peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor dari intervensi militer Amerika Serikat yang menyebabkan meningkatnya dinamika perlawanan munculnya ISIS meskipun telah dilaksanakan operasi anti-terorisme secara masif di Irak sejak tahun 2003. Tema ini menarik untuk diangkat karena terdapat persepsi di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintahan Amerika Serikat bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Irak dapat menjaga stabilitas dan keamanan di negeri tersebut. Namun kenyataannya adalah peperangan terus berlanjut hingga bertahun-tahun dan korban terus berjatuhan baik dari pihak Amerika Serikat maupun Irak, sehingga peneliti beranggapan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya intervensi militer Amerika Serikat di Irak menarik untuk diteliti.

1.4 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam bentuk artikel online, jurnal ilmiah,

ebook dan buku. Referensi-referensi tersebut terdiri dari berbagai topik yang terkait dengan intervensi militer Amerika Serikat di Irak serta perlawanan Irak terhadap aksi militer Amerika tersebut.

Sebuah buku yang berjudul *Empire of Fear Inside The Islamic State* yang ditulis oleh Hosken (2015) memberikan penjelasan mengenai sejarah intervensi militer Amerika Serikat, munculnya pemberontakan, terorisme, bangkitnya ISIS hingga penjelasan mendalam mengenai ISIS. Hosken (2015) memberikan pendekatan eksplanatif dengan menjelaskan beberapa fenomena di Irak dan mengaitkannya hubungan dan pengaruh antara keduanya. Dalam bukunya, ia menggambarkan bagaimana intervensi militer Amerika Serikat tahun 2003 memperburuk kondisi keamanan di Irak. Namun, Hosken (2015) tidak memulai penjelasannya melalui intervensi militer, ia memulai menarik benang merah sejak tahun 1996 di Afghanistan ketika sel-sel kelompok militan sedang dibentuk oleh beberapa tokoh penting yang berkontribusi pada tahap awal insurgensi di Irak, yaitu terdapat Abu Mus'ab al-Zarqawi dan Osama bin Laden yang sedang beroperasi dan berlatih di Afghanistan. Zarqawi dan Osama sama-sama menunggu kesempatan berikutnya untuk melancarkan revolusi jihadnya ke negara Arab berikutnya. Zarqawi bergerak terlebih dahulu dengan melancarkan serangan-serangan terornya di Yordania sementara Osama lebih berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya. (Hosken, 2015: 22-47).

Zarqawi dan Osama pada akhirnya mendapatkan keberuntungan melalui perang Irak tahun 2003, yang mana keduanya dapat mengembangkan jaringan militannya dan melancarkan serangan-serangan mereka. Pada akhirnya, keduanya sepakat

untuk bekerjasama dan melalui kerjasama tersebut, sebuah kelompok militan yang memayungi seluruh aktivitas kelompok militan Sunni di Irak dibentuk. Kelompok tersebut terus berkembang meskipun Zarqawi dan Osama bin Laden pada akhirnya tewas, karena Zarqawi telah mewariskan ideologi ekstrimnya dalam operasi dan struktur organisasi militannya. Pada akhirnya, setelah Abu Bakr Al-Baghdadi menjadi *Emir* ISIS pada tahun 2010, kelompok tersebut terus berkembang hingga mendominasi peta kekuasaan Irak pada tahun 2014 (Hosken, 2015: 226-235).

Hosken (2015) memberikan pandangan yang unik dalam bukunya dengan mengutip pandangan para *scholar* yang meneliti Irak serta mengutip manifesto kelompok militan seperti dari Zawahiri, Zarqawi dan Osama untuk memahami tujuan dari perjuangan mereka (Hosken, 2015: 35-38).

Masih terkait intervensi militer dan insurgensi di Irak, adalah sebuah buku berjudul *Management of Savagery: How America's National Security State Fueled The Rise of Al-Qaeda, ISIS and Donald Trump* oleh Blumenthal (2019). Buku ini pada dasarnya berupaya mengaitkan fenomena yang terjadi di Timur Tengah, yaitu secara spesifik di Irak dan di Suriah terhadap politik domestik Amerika Serikat. Namun, buku ini juga memberikan penjelasan yang cukup mendalam mengenai fenomena di Timur Tengah tersebut seperti buku referensi sebelumnya, yaitu melalui pendekatan eksplanatif yang menjelaskan suatu fenomena dan mengaitkan hubungan atau dampaknya terhadap fenomena lain (Blumenthal, 2019: 2).

Blumenthal (2019) berpendapat bahwa Amerika Serikat melalui CIA telah menyebabkan munculnya kelompok militan ekstrimis di Timur Tengah dengan

dilaksanakannya *Operation Cyclone* pada tahun 1980-1990an untuk mempersenjatai dan melatih kelompok Mujahidin di Afghanistan. Dengan dukungan tersebut, ia berpendapat bahwa Amerika Serikat memperkuat pengaruh tokoh seperti Zawahiri dan Osama bin Laden yang pada akhirnya melakukan serangan 9/11. Menurutnya, dukungan terhadap kelompok militan tersebut sangat tragis bagi Amerika Serikat karena Amerika Serikat mengulangi kesalahan tersebut di Irak, yang menyebabkan sebuah negara yang stabil dan sekuler hingga menjadi kolaps dan menjadi lahan yang subur bagi bangkitnya ekstrimisme dan ISIS (Blumenthal, 2019: 2).

Tidak hanya di Irak, Amerika Serikat menerapkan cara yang sama di Libya, Suriah dan negara-negara Arab lainnya dengan mendukung kelompok militan yang pada akhirnya justru menyebabkan meningkatnya perlawanan insurgensi di negara-negara tersebut. Kemudian, Blumenthal (2019) menyimpulkan bahwa kesalahan strategi tersebut hingga terjadinya serangan-serangan teror yang mengikutinya mendorong terpilihnya Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada tahun 2016. Meskipun kesimpulan dari penulis tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun Blumenthal (2019) juga mendalami penyebab kesalahan strategi Amerika Serikat di Irak sehingga peneliti dapat menggunakan buku ini untuk memahami pengaruh intervensi militer Amerika Serikat terhadap dinamika perlawanan kelompok insurgensi di Irak. Sebagai contohnya, Blumenthal (2019) berupaya menjelaskan bagaimana seorang militan bernama Abu Bakr-Naji menyusun sebuah rencananya dalam *Management of Savagery* yang terdapat simbiosis saling menguntungkan antara CIA dan kelompok militan untuk

menggulingkan pemerintah-pemerintah Arab, yang mana kemudian strategi Amerika tersebut menjadi bumerang karena kelompok militan merupakan aktor yang tidak dapat diprediksi perilakunya (Blumenthal, 2019: 3).

Berikutnya adalah sebuah buku serial Modern Warfare yang berjudul *The Iraq War Operation Iraqi Freedom 2003-2011* oleh Tucker-Jones (2014). Serial Modern Warfare menyajikan gambaran visual mengenai konflik di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam seri yang membahas perang Irak ini, Tucker-Jones (2014) mendalami tahap-tahap perang Irak sejak periode persiapan hingga berakhirnya invasi militer Amerika Serikat. Buku ini membahas secara runtut dan detail mengenai rencana aksi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahap invasi militer di Irak dan menjelaskan mengenai unit militer apa saja yang terlibat dalam intervensi militer tersebut. Buku ini unik menurut peneliti karena memberikan perspektif yang mendalam dari sudut pandang militer Amerika Serikat mengenai mekanisme serangan terhadap Irak. Buku ini tidak terlalu membahas aspek politik dari intervensi militer terhadap Irak, namun hanya secara umum mendukung dan mengikuti kebijakan pemerintahan Amerika Serikat. Karenanya, buku ini cenderung berpihak pada narasi pemerintah dan militer Amerika Serikat dan tidak terlalu menyajikan sudut pandang dari pihak seberangnya. Terbagi ke dalam 12 bab, buku ini membahas topik seperti kondisi pasukan militer Irak, pembentukan pasukan koalisi, serbuan marinir Amerika Serikat terhadap Irak, perebutan kota Baghdad, analisis mengenai kondisi angkatan udara dan angkatan laut Irak, pertempuran Fallujah, terorisme hingga membahas kemungkinan kepemilikan Irak terhadap senjata pemusnah massal. Semuanya dikemas dalam

susunan bab-bab yang menarik untuk dibaca dan diberikan representasi visual yang baik.

Meskipun narasinya yang cenderung berpihak pada Amerika Serikat, buku ini memberikan alur yang runtut dan mendalam mengenai proses intervensi militer Amerika Serikat di Irak serta operasi militer apa saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein hingga membangun Irak menuju ‘demokrasi’. Buku ini memberikan gambaran yang jelas dan menarik mengenai bagaimana invasi militer dipersiapkan. Contohnya, adalah bagaimana Amerika Serikat dan pasukan koalisinya termasuk Inggris mempersiapkan jalur logistik dan penempatan pasukan di negara-negara tetangga Irak sebelum invasi militer yang merupakan tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat dan koalisinya, serta menjelaskan berapa banyak jumlah pasukan yang diterjunkan oleh masing-masing negara koalisi (Tucker-Jones, 2014: 12-15). Selain itu, buku ini memberikan visualisasi menarik mengenai proses invasi Irak melalui serangkaian foto yang secara khusus disajikan beserta konteks setiap babnya, sehingga pembaca dapat memahami dan membangun gambaran visual seperti apa medan pertempuran di Irak.

Selanjutnya, sebuah buku yang ditulis oleh Malcolm W. Nance yang berjudul *The Terrorists of Iraq: Inside the Strategy and Tactics of the Iraq Insurgency 2003-2014* merupakan sebuah buku yang memiliki analisis yang mendalam tentang insurgensi dan terorisme di Irak. Nance (2015) memberikan perspektif yang menarik terhadap perang di Irak, yaitu insurgensi yang terjadi pasca invasi tidak lain adalah akibat dari kelalaian pengambil keputusan dan pimpinan militer dalam mengidentifikasi

dan mengakui ancaman yang ada di Irak. Penting dalam penulisan skripsi ini bagi penulis untuk mengetahui secara pasti siapakah pelaku insurgensi atau terorisme yang seringkali dipaparkan oleh media ataupun kepercayaan umum. Nance (2015) menganggap bahwa ada mispersepsi di tengah publik Amerika yang begitu parah bahwa pasukan Amerika Serikat berada di Irak untuk melawan Al-Qaeda. Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika menunjuk Al-Qaeda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas segala serangan teror dan serangan yang terjadi terhadap pasukan koalisi. Namun pernyataan tersebut menutupi kenyataan bahwa sebagian besar insurgensi awal dilakukan oleh masyarakat Irak sendiri yang tidak senang akan kehadiran pasukan Amerika dan kelompok loyalis Saddam yang tergabung dalam *Fedayeen Saddam* yang terdepak dari pemerintahan baru yang didominasi kelompok Syiah (Nance, 2015: 12). Sebelum invasi Amerika, Al-Qaeda tidak berada di Irak karena juga merupakan ancaman bagi rezim Saddam Hussein. Namun dengan dihadapkan pada ancaman eksistensial, rezim Saddam melalui dinas intelijennya mulai membuka keran masuknya pejuang dan militan asing untuk membantu perang melawan Amerika. Invasi Amerika Serikat membuka front pertempuran jihad baru di Irak yang sama sekali tidak diperkirakan oleh analis dan pembuat kebijakan di Amerika. Kebutaan pemerintah Amerika atas kondisi masyarakat Irak yang sesungguhnya membantu kelompok loyalis Saddam terhindar dari perhatian publik yang akhirnya dapat mengorganisasikan diri untuk melawan pasukan Amerika selama bertahun-tahun. Namun, narasi yang dibangun oleh Amerika dan medianya sebagian besar adalah bahwa pasukan Amerika sedang melawan terorisme Al-Qaeda. Kondisi ini justru menguntungkan kelompok

insurgensi lainnya karena mereka menjadi bebas untuk bergerak dan mampu memobilisasi kekuatan di tempat dan di waktu yang mereka inginkan (Nance, 2015: 7). Sementara itu, organisasi militan Sunni seperti *Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn* yang didirikan Abu Mus'ab al-Zarqawi baru aktif dan memainkan peran yang lebih sentral beberapa tahun setelah invasi. Organisasi inilah yang kemudian di tahun-tahun berikutnya akan bermetamorfosis menjadi ISIS. Buku ini juga membahas ideologi, strategi dan organisasi kelompok ISIS secara mendalam (Nance, 2015: xxvii).

Meskipun terdapat persamaan dari referensi-referensi di atas mengenai objek yang diteliti, yaitu mengenai Irak, namun terdapat perbedaan dalam fokus, waktu dan sudut pandang dari masing-masing penulisnya. Sebagai contohnya, Hosken (2015) memberikan penjelasan mengenai perang Irak melalui perjalanan embrio dari kelompok militan yang dimulai dari Afghanistan tahun 1990an hingga puncaknya pada tahun 2014. Hosken (2015) memberikan sudut pandang perkembangan insurgensi di Irak dari sudut pandang kelompok militan melalui pendapat, tulisan dan pernyataan pemimpin dan kebijakan kelompok-kelompok tersebut sepanjang eksistensinya selama pemberontakan di Irak. Hosken (2015) juga menjelaskan mengenai intervensi militer Amerika Serikat dan memberikan alasan mengapa intervensi tersebut menyebabkan meningkatnya dinamika perlawanan insurgensi di Irak.

Tidak berbeda jauh dengan referensi sebelumnya, Blumenthal (2019) juga membahas mengenai perang Irak, namun Blumenthal (2019) pada dasarnya berupaya mengaitkan fenomena tersebut dengan politik dalam negeri Amerika Serikat pada

tahun 2016. Namun, Blumenthal (2019) juga memberikan analisisnya mengenai situasi di Irak dan Timur Tengah, yaitu mengapa banyak muncul kelompok insurgensi dan ISIS. Blumenthal (2019) berpendapat bahwa hal tersebut tidak lain disebabkan oleh kebijakan keamanan Amerika Serikat sendiri yang seringkali bekerjasama dan mendukung kelompok-kelompok militan di Timur Tengah untuk melakukan kudeta atau penggantian rezim di beberapa negara Arab. Namun, dukungan tersebut pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi Amerika Serikat karena kelompok-kelompok militan tersebut justru bersikap antagonis terhadap pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah.

Sementara itu, buku *The Terrorists of Iraq* oleh Nance (2015) yang memberikan nuansa yang sangat berbeda dari referensi-referensi lainnya dikarenakan secara spesifik membahas mengenai kelompok pemberontak di Irak secara lebih mendalam. Peneliti sangat terbantu oleh buku ini dikarenakan terdapat penjelasan yang baik dan menarik mengenai pemberontakan dan insurgensi di Irak sekaligus pembawaannya yang melalui sudut pandang netral. Melalui buku ini, peneliti dapat mengetahui asal-usul pemberontakan di Irak hingga menjadi ISIS karena Nance (2015) memberikan gambaran kondisi di Irak sebelum dan pasca insurgensi serta menjelaskan tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam pemberontakan, sehingga peneliti dapat menemukan benang merah insurgensi di Irak terutama hingga menjadi kelompok ISIS yang mendominasi Irak pada tahun 2014.

Keempat referensi tersebut tentunya belum cukup untuk membahas seluruh aspek dari intervensi militer Amerika Serikat dan insurgensi yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti juga menggunakan berbagai referensi lainnya dalam

bentuk buku, koran online, artikel online website resmi hingga jurnal ilmiah yang membahas mengenai intervensi militer Amerika Serikat dan kelompok insurgensi untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini akan membahas aspek yang sama seperti penelitian di atas namun peneliti berfokus pada dampak intervensi militer Amerika Serikat di Irak yang menyebabkan perubahan pada dinamika perlawanan kelompok insurgensi dengan menggabungkan faktor-faktor yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang baru.

1.5 Kerangka Teori

Peneliti ingin mengemukakan 2 teori yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu intervensi militer dan insurgensi. Teori intervensi militer diperlukan untuk menjelaskan konsep dan kerangka berfikir peneliti dalam menganalisa intervensi militer Amerika Serikat, sementara teori insurgensi diperlukan untuk menjelaskan konsep insurgensi dan penyebab perlawanan yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Kemudian, peneliti menjelaskan hubungan antara keduanya melalui sebuah *loop diagram* untuk dapat menjelaskan peningkatan dinamika perlawanan insurgensi.

1.5.1 Intervensi Militer

1.5.1.1 Teori intervensi militer

Intervensi militer adalah suatu manuver yang dilakukan oleh pasukan militer suatu negara balik melalui darat, laut, udara maupun serangan terbuka terhadap negara lain dan memiliki sebuah tujuan yang jelas. Intervensi militer dapat dijustifikasikan oleh suatu negara ketika terjadi kekacauan domestik pada suatu negara yang

dianggap dapat mengancam keamanan regional atau internasional atau ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Dalam sebagian besar kasus, intervensi militer seharusnya mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB yang berhak menerbitkan resolusi penyelesaian suatu konflik. Namun, pada kenyataannya banyak negara yang melakukan intervensi militer secara unilateral (Hoffmann, 1995: 29).

Selain memperhatikan aspek justifikasi dan legalitas, suatu negara melakukan intervensi militer setelah mempertimbangkan aspek *when*, *who*, *what for* dan *how* dalam menentukan waktu dan kondisi yang sesuai untuk intervensi militer. Yang pertama adalah aspek *when* atau kapan intervensi militer dapat dilakukan. Terdapat dua argumen utama yang dapat menjadi tolak ukur kapan suatu intervensi militer dapat dilakukan oleh suatu negara. Yang pertama adalah dengan mempertimbangkan seberapa gentingnya kondisi yang dapat mengancam keamanan domestik maupun perdamaian internasional. Ketika suatu krisis terjadi pada suatu negara, kondisi tersebut dapat mengancam stabilitas kawasan dan melemahkan keamanan negara tetangga atau komunitas internasional secara umumnya. Suatu negara dapat menjadikan kondisi keamanan yang buruk di negara lain sebagai justifikasi untuk intervensi militer. Namun memang masih belum ada metode yang baku dan tetap untuk mengukur seberapa buruknya kondisi keamanan di suatu tempat sehingga dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk intervensi militer. Argumen kedua adalah intervensi militer dapat dilakukan ketika terdapat pelanggaran hak asasi manusia di negara lain (Hoffmann, 1995: 37).

Hoffmann (1995) memberikan definisinya sendiri mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu kejahatan yang meliputi genosida, pembersihan etnis, represi brutal dan berskala besar terhadap suatu penduduk, kelaparan buatan, rusaknya ketertiban umum, epidemik dan munculnya pengungsi dari suatu negara sebagai akibat dari kejahatan perang (Hoffmann, 1995: 37-38). Jika upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia secara diplomatis tidak berhasil, maka suatu negara dapat menggunakan cara sanksi ekonomi, finansial dan diplomatik sebelum intervensi yang bersifat koersif dapat dilakukan (Hoffmann, 1995: 39).

Aspek kedua adalah *who*, yaitu pihak mana yang dapat melakukan intervensi. Pihak-pihak yang menentang intervensi militer menggunakan dalih kedaulatan untuk menentang intervensi secara unilateral atau sepihak. Intervensi unilateral seringkali lebih dapat diterima jika terdapat ancaman terhadap perdamaian internasional dan pelanggaran hak asasi manusia. Pihak yang melakukan intervensi seharusnya adalah pihak yang telah mendapatkan mandat oleh PBB atau organisasi regional yang beroperasi dibawah PBB seperti Dewan Keamanan PBB. Ketika PBB tidak mampu menangani suatu masalah, baik karena lumpuh atau karena upaya yang dilakukan gagal mencapai tujuannya, maka seharusnya tidak ada suatu negara yang berhak melakukan intervensi militer. Negara yang melakukan intervensi secara unilateral harus bertanggungjawab atas intervensinya yang bersifat sepihak kepada PBB dan organisasi internasional terkait. Selain itu, intervensi juga hanya dapat dibenarkan ketika suatu negara meminta bantuan dari negara lain untuk menyelesaikan permasalahannya, atau untuk mencegah kekuatan asing menyerang dan menduduki suatu negara. Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahpahaman

internasional dan miskomunikasi, negara yang melakukan intervensi militer sebaiknya melapor kepada PBB dan organisasi regional yang terkait untuk menjelaskan tujuan dari intervensi militer. Negara yang memiliki kemampuan militer yang cukup kuat untuk melindungi atau menyerang negara lain seringkali ingin menunjukkan kekuatannya melalui intervensi unilateral. Selain itu, terdapat intervensi militer secara kolektif bisa yang bisa menjadi sah selama kriteria sebelumnya sudah terpenuhi dan mendapatkan mandat dari PBB atau organisasi regional yang terikat (Hoffmann, 1995: 39-40).

Berikutnya adalah *what for* dan *how*, yaitu tujuan dan bagaimana intervensi dilakukan. Metode dan cara intervensi bergantung pada tujuannya. Tujuan dari intervensi adalah untuk memaksa pihak lain untuk berhenti melakukan provokasi dan ancaman ataupun mencegah mereka mengambil kebijakan yang berbahaya bagi negara lain. Tindakan intervensi dapat meliputi *reward and sanctions* hingga aksi militer (Hoffmann, 1995: 40).

Dengan berfokus pada intervensi militer di negara-negara yang bermasalah dan negara konflik, Hoffman (1995) merumuskan tiga strategi untuk intervensi militer. Strategi minimalis adalah cara intervensi yang terbatas pada *humanitarian policies*, seperti bantuan terhadap korban bencana buatan manusia, seperti kelaparan tanpa menggunakan kekuatan militer. Bentuk dari kebijakan kemanusiaan ini berupa pengiriman makanan dan bantuan obat-obatan, serta perawatan kepada para pengungsi. Strategi ini seringkali disebut sebagai *Red Cross Approach*. Strategi kedua mengikuti argumen Rosalyn Higgins yang mana bantuan kemanusiaan hanya dapat dilakukan ketika situasi sudah aman. Sehingga tujuan utama dari intervensi

militer ini adalah upaya untuk menciptakan keamanan, yaitu upaya untuk mengakhiri kekerasan melalui perundingan gencatan senjata ataupun supervisi keamanan oleh pasukan asing. Strategi kedua ini sering disebut sebagai *peace enforcement* yang ditujukan untuk mengakhiri kekerasan dan menciptakan kondisi keamanan. Definisi *peace enforcement* tidak hanya meliputi upaya non kekerasan untuk mencapai keamanan, namun juga mengambil resiko lebih besar dibandingkan strategi minimalis, misalkan dengan upaya pencegahan adanya pihak yang melanggar kesepakatan gencatan senjata, atau melindungi korban dari serangan pemerintah. Berikutnya, strategi ketiga adalah intervensi militer demi intervensi kemanusiaan. Selama penyebab dari krisis kemanusiaan tidak terselesaikan, strategi ini menganggap bahwa tidak akan ada perubahan signifikan yang akan terjadi, sehingga diperlukan tindakan yang lebih drastis. Strategi ini bersifat lebih koersif dari sekedar menciptakan keamanan namun memiliki tujuan akhir mencapai adanya penyelesaian politik dan rekonsiliasi, baik secara sukarela maupun dengan paksaan untuk melucuti pihak yang menolak berunding dan memaksa kelompok yang terlibat untuk menerima penyelesaian yang disetujui oleh musuhnya dan komunitas internasional, ataupun dalam bentuk paksaan untuk menurunkan seseorang yang otoriter dari kekuasaan. Strategi ini mengharuskan negara yang melakukan intervensi untuk mengawasi implementasi dari penyelesaian politik dan kemauan untuk memainkan peran seperti kekuatan kolonial terhadap negara protekturat. Pendekatan ini disebut sebagai *resolution* (Hoffmann, 1995: 40-42).

1.5.1.2 Jenis Intervensi Militer: Invasi, Pasifikasi, Peacekeeping, Peace-enforcement, Humanitarian Intervention dan Military Assistance

Kekuatan militer merupakan salah satu bagian penting dari unsur kekuatan dan keamanan suatu negara. Setiap negara di dunia memiliki kekuatan militer yang berfungsi sebagai fungsi keamanan bagi negara tersebut. Kekuatan militer dapat digunakan baik dalam keadaan damai maupun perang untuk mencapai keamanan suatu negara dan mengimplementasikan kebijakan keamanannya. Kekuatan militer tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan keamanannya. Intervensi militer dapat dibagi menjadi beberapa macam yang dibagi berdasarkan tujuan dan metode yang digunakannya, yaitu *invasi*, *pasifikasi*, *peacekeeping*, *peace-enforcement*, *humanitarian intervention* dan *military assistance*.

Pertama-tama, invasi atau operasi militer ofensif adalah suatu serangan militer yang mana sebagian besar unit tempur suatu negara dengan secara agresif memasuki wilayah negara lain dengan tujuan menaklukkan, membebaskan, menduduki atau menciptakan kontrol atas suatu daerah, memaksa terjadinya pemisahan dari suatu negara, mencapai kesepakatan dengan suatu negara atau gabungan dari tujuan-tujuan tersebut. Suatu invasi militer dapat menjadi penyebab suatu perang, menjadi bagian dari suatu strategi untuk mengakhiri peperangan atau dapat menjadi perang itu sendiri. Karena besarnya skala operasi yang sering terlibat dalam invasi, sifatnya sangat strategis baik dalam perencanaan maupun eksekusinya. Target awal dari invasi yaitu adalah untuk mengalahkan, menghancurkan atau menetralsir kekuatan musuh. Karena operasi ofensif seringkali mengekspos posisi penyerangnya, maka kekuatan yang lebih superior dibandingkan lawan dibutuhkan untuk menciptakan

celah di barisan musuh. Beberapa karakteristik dari invasi militer adalah adanya elemen kejutan, konsentrasi kekuatan, tempo yang cepat dan keberanian. Elemen kejutan adalah salah satu bagian penting dari invasi, dengan mencapai kejutan, kesempatan musuh untuk bereaksi atau menggunakan senjata pemusnah massal dapat lebih dihindarkan. Kedua, konsentrasi kekuatan adalah pengumpulan kekuatan militer pada suatu sisi untuk memecah formasi musuh. Meskipun elemen kejutan dapat berkontribusi pada suksesnya invasi, pemusatan kekuatan diperlukan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam barisan musuh. Meskipun begitu, suatu pasukan yang terkumpul dapat dieksploitasi oleh musuh untuk diserang dengan senjata pemusnah massal. Ketiga, tempo adalah seberapa cepatnya aksi militer yang dilakukan. Kecepatan adalah elemen penting dalam peperangan modern yang mana serangan kilat dapat memecah konsentrasi pasukan musuh dan merebut suatu posisi sebelum musuh dapat bereaksi cukup cepat. Elemen kecepatan didukung dengan kemampuan mobilitas pasukan menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara. Keempat, keberanian adalah salah satu komponen penting juga dari invasi. Para komando militer harus memahami resiko yang akan dihadapi pasukannya dan harus berani mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan keberhasilan atau kegagalan invasi. Kunci dari berhasilnya invasi adalah mampu tidaknya mengalahkan militer musuh sebelum mencapai titik kulminasi. Titik kulminasi terjadi ketika penyerang telah mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatan untuk pertempuran. Pada akhirnya, pihak penyerang tidak lagi memiliki kekuatan menyerang untuk mempertahankan momentum serangan. Dalam kondisi perang kimia dan biologis, titik kulminasi dapat terjadi lebih cepat dibandingkan ofensif

konvensional (Marine Corps Warfighting Publication, tt. : 1-2). Ketika tujuan dari invasi sudah dicapai, yaitu merebut posisi musuh atau menghancurkan kekuatan militer musuh, para komandan militer harus mampu melakukan transisi menuju strategi bertahan untuk meyuplai dan mereorganisir pasukannya untuk mempertahankan posisi yang telah direbut (Marine Corps Warfighting Publication, tt. : 8).

Kedua, intervensi militer pasifikasi adalah operasi militer yang melibatkan peredaman atau pelemahan suatu gerakan perlawanan yang timbul pada suatu wilayah dengan kekuatan militer. Pasifikasi adalah istilah yang kontroversial dan kompleks dalam sejarah militer Amerika Serikat. Hal ini bersifat kontroversial karena jenis intervensi ini cenderung tidak ramah terhadap masyarakat sipil yang menjadi objek utama maupun sampingan dalam peperangan itu sendiri. Pasifikasi sifatnya juga kompleks karena melibatkan gabungan antara upaya militer, politik dan ekonomi untuk melindungi, mengontrol, menenangkan atau memaksa penduduk sipil. Pasifikasi juga dapat merujuk pada upaya untuk meredam gerakan antikolonial. Karena sifatnya yang politis dan cenderung melibatkan penduduk sipil, konsep ini kurang populer di kalangan perwira militer Amerika Serikat yang seringkali menganggap pasifikasi hanya sebagai tujuan tersier dalam intervensi militer (“Pacification”, 2000).

Bergantung pada intensitas serangan gerilya, pasifikasi dapat memiliki berbagai macam bentuk. Dari sudut pandang militer, pasifikasi seringkali melibatkan upaya perlindungan penduduk sipil dari serangan kelompok gerilyawan atau upaya mencegah kelompok gerilyawan untuk mendapatkan akses terhadap dukungan

material dan psikologis dari penduduk sipil. Selain melalui tekanan militer, pasifikasi juga dapat didukung oleh upaya pemerintah lokal melalui cara-cara seperti relokasi penduduk sipil, membatasi moda produksi ataupun program lainnya yang mencegah kelompok gerilyawan mencegah akses sumber kebutuhan yang dimiliki penduduk sipil. Dengan melemahkan kemampuan logistik gerilyawan, cakupan dan intensitas insurgensi dapat dibatasi. Bagi agen polisi dan intelijen, pasifikasi melibatkan identifikasi dan penangkapan kelompok insurgen yang bersembunyi di tengah masyarakat. Melalui interogasi para insurgen yang berada di tengah masyarakat, agen pemerintah dapat mengetahui jaringan dan akses para insurgen. Dengan mengeliminasi akses insurgen terhadap dukungan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat, pemerintah dapat memaksa para gerilyawan atau insurgen untuk meninggalkan perlawanan bersenjata dan berpartisipasi dalam kegiatan politik (“Pacification”, 2000).

Ketiga, *peacekeeping* atau upaya penjagaan perdamaian. Menurut definisi PBB, *peacekeeping* adalah pengerahan kekuatan militer untuk membantu suatu negara yang hancur oleh konflik supaya dapat menciptakan kondisi yang mendukung adanya suatu perdamaian. Operasi militer *peacekeeping* ditujukan untuk mengurangi jumlah korban tewas dari kalangan penduduk sipil dan juga mengurangi jumlah kombatan yang tewas karena tingginya frekuensi pertempuran melalui upaya penegakan gencatan senjata. Melalui kerangka kerja PBB, suatu pihak yang melakukan *peacekeeping* harus melakukan pengawasan dan menjaga proses perdamaian di wilayah konflik dan membantu para pihak yang berseteru untuk berkomitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati. Bantuan tersebut

dapat datang dalam berbagai jenis, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun rasa percaya antara kedua pihak, pembagian kekuasaan, memperkuat peran hukum dan mendukung kembalinya aktivitas ekonomi dan sosial. Personel yang dilibatkan dalam misi *peacekeeping* dapat meliputi tentara, polisi hingga personel sipil. Para *peacekeepers*, yaitu pihak yang bertindak melakukan kegiatan *peacekeeping* harus bersikap netral terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (“United Nations Peacekeeping”, 2019).

Sementara itu, *peace enforcement* adalah pengerahan kekuatan militer untuk memaksa terciptanya perdamaian dari suatu konflik, baik dengan memaksa gencatan senjata atau melalui upaya pemberhentian permusuhan dari pelaku kombatan dalam peperangan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan unit militer yang bukan hanya bertugas dalam operasi *peacekeeping*, namun sesuai mandat dari Dewan Keamanan PBB, upaya *peace enforcement* harus memiliki kemampuan untuk memaksa resolusi dan gencatan senjata yang telah disepakati. *Peace enforcement* berbeda dengan *peacekeeping* yang mana penggunaan kekuatan kekerasan atau paksaan digunakan untuk memaksa pihak yang berseteru menuju meja perundingan. *Peace enforcement* lebih baik dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat konflik yang dianggap netral dan berjalan atas mandat PBB. Meskipun PBB memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya perang, sepanjang sejarah terdapat contoh dimana Dewan Keamanan PBB menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan resolusinya. Upaya *peace enforcement* tersebut dilindungi dalam Piagam Bab 7 dari Piagam PBB. R.A. Akindele mendefinisikan *peace enforcement* sebagai penggunaan kekuatan militer di bawah pengawasan PBB

untuk mengatasi ancaman agresi yang sudah terbukti, meskipun masih terdapat perdebatan sendiri dalam PBB mengenai seberapa jauh kekuatan militer dapat dikerahkan untuk merespon suatu agresi (Audu, 2014: 15-16)

Kelima, *humanitarian intervention* atau intervensi militer kemanusiaan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer suatu negara terhadap negara lain yang tujuannya adalah untuk mengakhiri pelanggaran HAM ataupun mencegah terjadinya penderitaan lebih lanjut terhadap masyarakat yang terkena bencana atau korban peperangan di suatu negara (Marjanovic, 2011). Istilah intervensi militer kemanusiaan telah digunakan sejak tahun 1990an untuk mendeskripsikan penggunaan kekuatan militer oleh negara atau organisasi internasional dalam merespon terjadinya genosida, pembersihan etnis dan kejahatan lain yang diderita oleh masyarakat yang disebabkan oleh pemerintahnya sendiri. Setelah perang dunia kedua, terdapat banyak contoh intervensi militer kemanusiaan seperti intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin dan penggunaan militer Prancis terhadap negara bekas koloninya di Republik Afrika Tengah. Menurut Holzgrefe (2003), intervensi militer kemanusiaan adalah “the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than it’s own citizens, without the permission of the state within whose territory is applied” (Holzgrefe & Keohane, 2003: 18).

Intervensi militer kemanusiaan berbeda dengan intervensi lainnya seperti intervensi kemanusiaan sipil, pemberian sanksi, perubahan status hubungan diplomatik, pengawasan pengiriman senjata, pengawasan HAM ataupun *peacekeeping*.

Intervensi militer kemanusiaan tidak memerlukan persetujuan dari negara yang dituju karena sifatnya yang koersif. Intervensi dilakukan ketika ada suatu pemerintahan negara yang dianggap bertanggungjawab terhadap bencana kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya namun tidak berupaya mencegah atau menghentikan bencana kemanusiaan tersebut. Mereka yang terkena bencana kemanusiaan tersebutlah merupakan objek utama dalam misi intervensi militer kemanusiaan. Menurut Nicholas Wheeler, intervensi militer kemanusiaan adalah upaya ‘saving strangers’. Tujuan dari pihak yang melakukan intervensi ini adalah untuk menyelamatkan dan melindungi mereka yang menderita dikarenakan kegagalan atau tindakan sengaja dari pemerintah mereka. Tujuan dari intervensi jenis ini bukanlah untuk menaklukkan wilayah negara lain, mendukung pemberontakan, perubahan rezim ataupun upaya mempengaruhi politik negara lain, namun hanya untuk mencegah terjadinya korban yang lebih lanjut dari suatu konflik (“Armed Humanitarian Intervention”, t.t.)

Terakhir, intervensi militer jenis *military assistance* atau *military aid* adalah bentuk intervensi militer tidak langsung melalui bantuan militer berupa bantuan fisik, materiil hingga bantuan intelijen dan pelatihan. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memahami fungsi bantuan militer sebagai alat diplomasi dalam perang dunia kedua. Bantuan militer dipercayai oleh para pembuat kebijakan di Amerika Serikat dapat memenuhi kepentingan negara yang dalam hal ini sesuai kepentingan Amerika Serikat yaitu untuk mempromosikan model perekonomian kapitalis liberal dan meningkatkan keamanan nasional Amerika Serikat dengan memperkuat persenjataan negara-negara yang dianggap menjadi sekutu Amerika

Serikat. Amerika Serikat adalah negara kontributor bantuan militer terbesar di dunia dengan memberikan berbagai jenis bantuan militer kepada 150 negara setiap tahunnya. Setelah perang dunia kedua, Amerika Serikat mengirimkan bantuan militer kepada Prancis, Inggris, Cina dan Filipina untuk mencegah menyebarnya komunisme di negara-negara tersebut dan memperkuat sekutunya (Sibley, 2002).

Terdapat beberapa cara dalam menyalurkan bantuan militer. Pertama, *foreign military financing* yaitu merujuk pada pemberian bantuan keuangan terhadap negara lain untuk membeli persenjataan, perawatan persenjataan dan pelatihan. Contohnya, sejak tahun 1950 Amerika Serikat telah menggelontorkan 91 miliar dollar kepada berbagai militer di dunia. Sebagian besar bantuan tersebut ditujukan kepada Israel dan Mesir sebagai hadiah kepada kedua negara tersebut setelah mencapai perdamaian di tahun 1979. Kedua, *International Military Education and Training* (IMET) yaitu pemberian bantuan keuangan kepada negara lain untuk memberikan pelatihan profesional mengenai manajemen militer dan kemampuan teknis. Program ini disebutkan dapat meningkatkan hubungan yang positif antar militer dua negara sehingga bagi Amerika Serikat program ini diharapkan juga dapat mampu menyebarkan nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat melalui kerjasama teknis antara personil militer Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Ketiga, *Counter-Narcotics Assistance*, yaitu pemberian bantuan keuangan atau peralatan militer dan pelatihan terhadap negara lain yang secara fokus ditujukan untuk memerangi produksi dan pengedaran narkoba. Bantuan tersebut secara umum didedikasikan untuk mengekspor persenjataan atau perawatan peralatan militer yang sudah ada. Keempat, *non-proliferation, anti-terrorism, demining and*

related programs. Bantuan ini adalah bantuan keuangan untuk mendukung berbagai jenis bantuan keamanan sesuai tujuan kepentingan nasional. Bantuan ini ditujukan untuk program-program non-proliferasi nuklir, bantuan anti-terorisme, aktivitas penghapusan ranjau dan pelucutan senjata di wilayah konflik. Kelima, *peacekeeping operations* (PKO). Bantuan keuangan untuk tujuan penciptaan perdamaian ini ditujukan kepada misi-misi PBB di seluruh dunia. Bantuan PKO ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan organisasi regional maupun PBB untuk melakukan proses resolusi konflik dan membantu upaya multinasional ketika mekanisme *cost sharing* tidak dapat dilakukan (“U.S. Foreign Military Assistance”, t.t.).

1.5.2 Insurgensi

1.5.2.1 Definisi, Teori & Karakteristik Insurgensi

Terdapat beberapa definisi mengenai insurgensi yang dapat menjelaskan konsep insurgensi secara luas, yaitu definisi insurgensi itu sendiri, kontra-insurgensi dan milisi dan terorisme. Pertama, insurgensi adalah perjuangan militer dan politik yang berkepanjangan yang bertujuan untuk menumbangkan atau merubah legitimasi suatu pemerintahan atau kekuatan pendudukan atau secara penuh mengontrol sumberdaya suatu wilayah melalui penggunaan kekuatan militer irreguler dan organisasi politik ilegal. Ciri utama dari kelompok insurgensi adalah tujuan mereka yang ingin mengontrol populasi pada suatu wilayah, termasuk sumber dayanya. Tujuan ini membedakan kelompok insurgen dari kelompok lainnya yang murni merupakan organisasi teroris. Penting untuk digaris bawahi bahwa menyebut suatu kelompok sebagai kelompok insurgen bukan menandakan penilaian normatif

terhadap legitimasi dari gerakan ataupun tujuannya. Istilah insurgensi adalah hanya sebagai deskripsi sifat dari gerakan atau konflik (“Guide to the Analysis of Insurgency 2012”, 2012: 1).

Kedua, istilah kontra-insurgensi (COIN) adalah upaya-upaya yang digunakan pemerintahan suatu negara untuk melawan insurgensi. Upaya kontra insurgensi menggabungkan kinerja politik, keamanan, hukum, ekonomi, pembangunan dan psikologis untuk menciptakan pendekatan holistik yang ditujukan untuk melemahkan insurgen sekaligus menguatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Setelah itu, terdapat istilah perang gerilya yang merupakan bentuk peperangan yang mana unit militer kecil yang bersenjata ringan digunakan untuk melawan musuh yang lebih kuat. Perang gerilya menggunakan serangan-serangan skala kecil, seperti penyergapan untuk mengacaukan musuh dan tidak melakukan serangan besar untuk menghancurkan musuh (“Guide to the Analysis of Insurgency 2012”, 2012: 1).

Ketiga, istilah milisi dan terorisme yang seringkali digunakan secara bersamaan, namun memiliki arti yang berbeda. Milisi adalah sekelompok pejuang yang seringkali mewakili kelompok etnis, agama, klan, kelompok komunal atau kelompok politik yang bisa saja bekerja mendukung pemerintah atau melawan pemerintah. Kelompok milisi bergerak secara independen dalam melawan kelompok milisi lain ataupun dapat terlibat dalam aktivitas kriminal. Sementara terorisme menurut definisi US Code Law Title 22 adalah kekerasan yang direncanakan terhadap target non-kombatan yang dimotivasi oleh kepentingan politik oleh kelompok subnasional atau agen rahasia. Sebagian besar kelompok

insurgen seringkali menggunakan cara-cara terorisme untuk mencapai tujuan mereka (“Guide to the Analysis of Insurgency 2012”, 2012: 1-2).

1.5.2.2 Jenis-jenis Insurgensi

Insurgensi dapat dibagi berdasarkan tujuan dan metode yang digunakan. Ciri-ciri insurgensi terkadang mempunyai kemiripan dan tujuan dari insurgensi dapat juga berubah dalam proses konflik. Dalam konflik, beberapa kelompok insurgen dapat beroperasi secara bersamaan, baik dalam kerjasama maupun berkompetisi satu sama lain. Selain itu, motivasi individu pejuang mungkin berbeda dari kelompoknya secara umum, sehingga menjadikan insurgensi sebagai kelompok yang kacau, campuran dan terdiri dari individu dengan kualitas yang berbeda. Meskipun begitu, dalam skala yang lebih luas, tujuan dan cara insurgensi dapat dikategorikan menjadi revolusioner, reformis, separatis, resistensi dan komersialis. Dalam konteks perang Irak, jenis insurgensi yang terjadi adalah resistensi. Menurut definisi kategori tersebut, resistensi adalah insurgensi yang bertujuan mengusir kekuatan pendudukan supaya keluar dari suatu negara atau wilayah (“Guide to the Analysis of Insurgency 2012”, 2012: 2).

Selain itu, terdapat cara lain untuk mengkategorisasikan insurgensi yaitu berdasarkan struktur organisasi dan penekanan pada aspek politik atau militer dari perjuangannya. Dengan cara tersebut, kita dapat membagi insurgensi menjadi *politically organized*, *militarily organized*, *traditionally organized* dan *urban-cellular*. Berdasarkan penelitian mengenai insurgensi di Irak, insurgensi di negara tersebut dapat dikategorikan sebagai campuran dari *military*, *traditionally*

organized dan *urban cellular* (“Guide to the Analysis of Insurgency 2012”, 2012: 4).

Insurgensi di Irak dapat disebut sebagai *military organized* karena bentuk perlawanannya memiliki penekanan pada aksi militer terhadap pemerintah dan masyarakat dibandingkan dengan cara-cara politik. Para Insurgen melakukan perhitungan untuk operasi serangan yang dapat melemahkan pemerintah pusat yang akan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung insurgensi. Jenis insurgensi ini dimulai dengan struktur politik yang kecil, lemah dan didominasi oleh pimpinan militer. Sebelum invasi Amerika Serikat dimulai pada tahun 2003, sejak tahun 2002 Saddam Hussein telah memahami bahwa militernya tidak akan kuat menahan invasi multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sehingga, ia merencanakan melakukan insurgensi oleh kelompok-kelompok kecil yang akan bekerja di belakang garis musuh dan akan melancarkan serangan gerilya dan terorisme. Rencana ini diketahui sebagai *Project III*. Bersama dengan putranya Uday & Qusay, Saddam akan mengomando berbagai kelompok insurgen seperti Jaysh al-Mohammed, Hizb al-Awda namun seluruh kelompok insurgen tersebut berada dibawah komando *Unified Mujahideen Command*, sementara sayap militernya dinamakan *Mujahideen Army*. Saddam telah mempersiapkan sebelum invasi pasukan koalisi tiba untuk menimbun persenjataan di tanah dan setelah invasi selesai, masyarakat lokal dapat menggali persenjataan tersebut yang berupa senapan mesin hingga roket peluncur granat untuk berjuang dengan insurgensi (Nance, 2015: 20-22). Karena ditemukan matangnya persiapan kelompok insurgen di Irak dalam melawan pendudukan pasukan Amerika, Mayor Jenderal Charles H.

Swannack Jr. sebagai komandan Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat mengatakan bahwa: “I believe Saddam Hussein always intended to fight an insurgency should Iraq fall. That’s why you see so many of these arms caches out there in significant numbers all over the country. They were planning to go ahead and fight an insurgency” (Nance, 2015: 22).

Kemudian, insurgensi di Irak dapat dikategorikan juga sebagai *traditionally organized* karena terdapat beberapa kelompok insurgen yang berdiri berdasarkan kelompok etnis atau kepercayaan tertentu. Contohnya adalah kelompok *Mahdi Army* yang merepresentasikan kelompok Syiah dan *Ansar al-Islam fi Kurdistan* yang merepresentasikan kelompok Sunni di Kurdistan. Terakhir, insurgensi di Irak dapat dikatakan *Urban Cellular* karena berkembang di daerah perkotaan. Jenis insurgensi ini memiliki struktur politik dan militer yang lemah dibandingkan jenis-jenis lainnya, namun mengorganisasikan dirinya dalam kelompok kecil yang semi-otonom. Jenis insurgensi ini seringkali menggunakan cara-cara terorisme. Contoh insurgensi jenis ini adalah pada Al-Qaeda Irak pada pertempuran Fallujah tahun 2004 yang mana Al-Qaeda Irak memusatkan organisasi dan perlawanan dari kota Fallujah (Nance, 2015: 23).

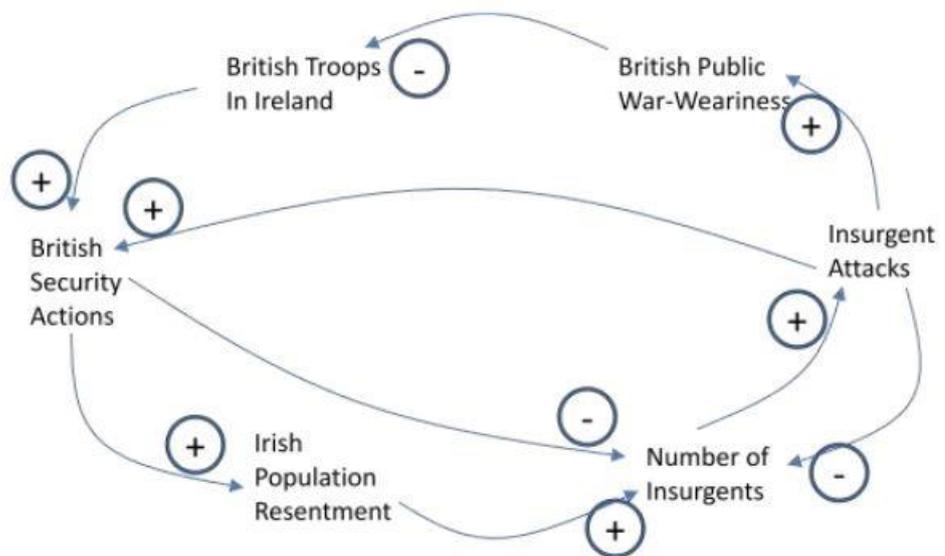
1.5.3 Hubungan Intervensi Militer dan Insurgensi

Untuk memahami hubungan antara intervensi militer dan insurgensi secara lebih mendalam, peneliti perlu untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara intervensi militer dan insurgensi melalui diagram lingkaran dalam kasus Perang Anglo-Irlandia pada tahun 1916. Peneliti menggunakan diagram lingkaran atau *influence diagram* untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari fenomena

insurgensi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Diagram ini memiliki variabel kuantitatif dan variabel terikat. Sehingga perubahan jumlah pada variabel kuantitatif dapat mempengaruhi variabel terikatnya.

Dengan menggunakan pola pikir seperti di atas, dalam konteks intervensi militer Amerika Serikat di Irak peneliti mengganti nama variabel Inggris menjadi Amerika Serikat, sementara nama variabel Irish digantikan dengan Irak. Sehingga, dengan pola pikir tersebut, *influence diagram* tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi insurgensi di Irak.

Grafik 1.1: Hubungan antar variabel insurgensi dalam konteks Perang Anglo-Irlandia tahun 1916



Sumber: Kott & Skarin, 2016: 6

Dalam grafik 1.5, *influence diagram* menunjukkan variabel dan kaitan intensitas insurgensi (Insurgent Attacks) dalam perang Anglo-Irlandia dengan intensitas aksi militer Inggris (British Security Actions). Pertama-tama, variabel Jumlah Insurgen

(Number of Insurgents) menunjukkan jumlah pemberontak anti-Inggris yang berada di Irlandia. Tanda plus dan minus menandakan meningkatnya atau menurunnya nilai suatu variabel. Peningkatan jumlah pemberontak berdampak pada meningkatnya serangan pemberontak (Insurgent Attacks). Meningkatnya jumlah serangan secara berurutan berdampak pada meningkatnya variabel kelelahan perang publik Inggris (British Public War-weariness), sehingga membatasi atau mengurangi jumlah pasukan Inggris di Irlandia (British Troops in Ireland). Pembatasan jumlah pasukan mendorong peningkatan upaya pengamanan yang lebih keras oleh pasukan Inggris (British Security Actions) yang kemudian mendorong meningkatnya kebencian masyarakat Irlandia (Irish Population Resentment) sehingga menyebabkan semakin banyaknya masyarakat Irlandia yang bergabung pemberontak (Number of Insurgents). Di sisi lain, variabel upaya pengamanan oleh pasukan Inggris (British Security Actions) juga berkontribusi pada penangkapan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pemberontak. Dari diagram ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa variabel kunci terdapat pada variabel upaya pengamanan pasukan Inggris (British Security Actions) yang mana jika dapat lebih berhasil pada upaya penangkapan para pemberontak tanpa menyebabkan kemarahan masyarakat Irlandia maka seharusnya dapat mencegah semakin banyaknya masyarakat Irlandia yang bergabung pada pemberontakan (Kott & Skarin, 2016: 6). Hal yang sama juga dapat diterapkan dalam konteks pasukan Amerika Serikat di Irak, yaitu jika pasukan Amerika Serikat mampu mengurangi jumlah militan di Irak tanpa menimbulkan kebencian dari masyarakat

Irak, Amerika Serikat dapat menghindari keberlanjutan siklus ini dan mengakhiri peperangan dengan lebih cepat.

Diagram ini menjelaskan dinamika insurgensi yang kompleks dan non-linear secara sederhana. Dalam model yang sederhana ini dijelaskan bahwa meningkatnya serangan oleh pemberontak dapat mempengaruhi jumlah pemberontak dengan lima cara yang berbeda karena terdapat lima cara dari variabel serangan pemberontak hingga menuju pada variabel jumlah pemberontak. Diagram ini dapat mempermudah dalam menjelaskan kaitan antara intervensi militer dengan insurgensi dikarenakan pada model ini terdapat variabel jumlah pasukan dan variabel jumlah pemberontak yang secara tidak langsung terkait. Dalam diagram ini, variabel dan hubungan mereka dengan variabel-variabel lainnya mampu diidentifikasi secara jelas. Sifat kuantitatif seperti pengaruh peningkatan variabel A mempengaruhi jumlah variabel B dapat ditentukan dengan baik. Hubungan timbal-balik dan efek samping dapat diidentifikasi dan model representasi visual memudahkan memahami model tersebut (Kott & Skarin, 2016: 6).

Kesimpulannya adalah dengan memperhatikan variabel British Military Actions sebagai acuan yang dapat menambah atau mengurangi jumlah pemberontak, maka dalam hal ini intervensi militer juga dapat menambah atau mengurangi jumlah pemberontak sesuai dengan kebijakan dan strategi keamanan yang diambil oleh negara yang melakukan intervensi.

1.6 Hipotesis

Terdapat pengaruh yang diberikan intervensi militer Amerika Serikat terhadap dinamika perlawanan kelompok insurgensi di Irak, yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah serangan dan berkembangnya kelompok-kelompok insurgensi setelah intervensi militer tahun 2003. Intervensi militer Amerika Serikat di Irak telah menyebabkan meningkatnya dinamika perlawanan kelompok insurgensi yang disebabkan oleh faktor yaitu miscalculasi strategi oleh Amerika Serikat serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang terhadap masyarakat Irak sehingga menyebabkan meningkatnya dinamika perlawanan kelompok insurgensi sebagai efek sampingnya.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Yang dimaksud dengan metode pendekatan eksplanatif adalah dengan menjelaskan, menggambarkan atau menuturkan dan menafsirkan data atau fenomena objek penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dan ditemukan hubungan antar data tersebut. Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan, menguji hipotesis dan membuat prediksi dari fenomena yang diteliti. Selain itu penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat atau memfalsifikasi suatu teori melainkan bertujuan memahami suatu fenomena spesifik menggunakan teori untuk membantu menjelaskan.

1.7.2 Operasionalisasi konsep

1.7.2.1 Intervensi militer

Intervensi militer adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh pasukan reguler suatu negara baik melalui darat, laut, udara maupun serangan terbuka oleh suatu negara terhadap negara lain dalam konteks persengketaan politik. Kemudian, intervensi militer harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bisa terjadi hanya secara insidental. Pertempuran kecil-kecilan atau pelanggaran perbatasan oleh unit militer suatu negara secara kebetulan tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi militer. Pasukan militer yang ditugaskan di pangkalan militer di luar negeri, jika mereka pergi keluar dari baraknya dan ikut terlibat dalam misi militer di negara tersebut maka termasuk dalam intervensi militer. Penasehat militer dapat dianggap sebagai bagian dari intervensi militer ketika mereka terlibat dalam pertempuran secara langsung (Kisangani & Pickering, 2008: 2).

1.7.2.2 Miskalkulasi Strategi

Strategi adalah metode dan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Semua orang memerlukan strategi, baik dalam dunia militer, bagi politikus, partai politik hingga kehidupan sehari-hari juga memerlukan strategi. Tidak ada organisasi yang dapat bekerja dengan efektif tanpa adanya suatu strategi. Dengan menggunakan strategi, seseorang dapat melihat lebih dari kenyataan jangka pendek untuk melihat hal-hal dalam sudut pandang jangka panjang dan menemukan hal-hal yang lebih penting dan untuk menyelesaikan sumber permasalahan bukannya gejala dari suatu fenomena. Definisi kontemporer mengenai strategi adalah

kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara dan jalan yang digunakan (Freedman, 2013: ix-xi)

Dalam mengelola suatu negara juga diperlukan strategi. Meskipun suatu negara telah melakukan perencanaan strategi, implementasi strategi dapat berakhir dalam kegagalan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menyebabkan gagalnya suatu strategi adalah oleh buruknya perencanaan dari strategi itu sendiri, tidak koherennya para penyusun strategi dalam perencanaan maupun miscalculasi ketika menyusun strategi. Sementara faktor eksternal dapat disebabkan oleh perubahan pada kondisi di lapangan, *fog of war*, hingga minimnya faktor pendukung di lapangan.

Miscalculasi strategi adalah terjadinya kesalahan dalam penyusunan strategi untuk mencapai tujuan. Suatu strategi disusun untuk membantu penyusunnya mencapai suatu tujuan, namun karena adanya miscalculasi, meskipun telah disusun strategi yang sesuai dengan tujuannya, maka dapat menyebabkan gagalnya seseorang mencapai tujuannya. Selain itu, adanya perbedaan antara persepsi penyusun strategi dengan fakta di lapangan juga dapat menyebabkan gagalnya implementasi strategi. Kemudian, kurangnya informasi yang didapatkan oleh penyusun kebijakan menyebabkan ia tidak dapat menyusun strategi yang sesuai ataupun terdistorsinya persepsi penyusun kebijakan dengan kenyataan di lapangan sehingga strategi yang disusun tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dalam dunia militer, sering disebut istilah *fog of war* yang menandakan keterbatasan informasi para penyusun strategi yang disebabkan oleh minimnya informasi dan pengetahuan mengenai kondisi lawan (Freedman, 2013: xii-xiv).

Dalam konteks perang Irak, miscalculasi strategi Amerika Serikat dapat diidentifikasi dalam kesalahan memperkirakan jumlah pasukan yang dibutuhkan dan kesalahan dalam menentukan periode yang diperlukan untuk intervensi militer. Para pengambil kebijakan di pemerintahan Amerika Serikat pada awalnya memperkirakan bahwa jumlah pasukan yang diperlukan untuk intervensi militer lebih sedikit dari yang diperlukan, yaitu hanya sekitar 150.000 pasukan. Meskipun sebelumnya para ahli strategi militer dari pentagon merekomendasikan angka yang lebih banyak yaitu sekitar 500.000 pasukan, saran tersebut tidak diikuti oleh Presiden Bush dan lingkaran dalamnya (Pitney, 2008).

1.7.2.3 Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Perang

Hak asasi manusia adalah seperangkat norma yang melindungi semua orang dari kekerasan dan penyalahgunaan yang didorong oleh motif politis, hukum maupun sosial. Hak asasi manusia dapat hadir dalam bentuk kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak asasi manusia ditujukan untuk mempertahankan eksistensi, nilai-nilai alamiah, universalitas dan status hukum manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dilepaskan dari manusia dan tidak terikat hukum suatu negara yang berdiri sendiri sebagai suatu norma sosial. Beberapa contoh hak asasi manusia meliputi hak-hak terhadap hak sipil dan politik, hak sosial, hak terhadap perempuan dan kelompok minoritas serta hak lingkungan (“Human Rights”, 2019)

Kejahatan perang dalam hukum internasional adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan dalam peperangan yang ditentukan oleh hukum dan perjanjian internasional. Istilah kejahatan perang sulit untuk didefinisikan secara pasti, karena penggunaannya telah berubah sejak pertamakalinya disebutkan setelah perang dunia pertama. Menurut Liever Code yang diterbitkan oleh Abraham Lincoln semasa perang saudara Amerika Serikat, kejahatan perang adalah “A serious breach of the law of war to force the subjects of the enemy into service for the victorious government” dan “prohibition of wanton violation committed against persons in the invaded country, including rape, maining and murder”. Sehingga secara umum, kejahatan perang dapat didefinisikan sebagai upaya pemaksaan pihak tawanan lawan atau perbuatan kejahatan terhadap penduduk di wilayah yang diserbu yang melibatkan kekerasan seperti pemerkosaan hingga pembunuhan (“War Crime, International Law”, 2019).

Dalam perang Irak, kejahatan perang dilakukan baik oleh pasukan Amerika Serikat maupun para kelompok militan yang melawan Amerika Serikat. Namun, peneliti lebih berfokus pada kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat yang berdampak pada meningkatnya dinamika perlawanan Irak terhadap Amerika Serikat. Beberapa kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia adalah penyiksaan, pembunuhan, dan penyiksaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib maupun pembunuhan terhadap warga sipil yang terjadi di beberapa kota dan desa di Irak (Poole, 2006).

1.7.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dari tahun 2003 hingga 2014 di Irak, yaitu dari dimulainya intervensi militer hingga kelompok insusrgensi yang direpresentasikan oleh ISIS menjadi dominan Irak pada tahun 2014. Tahun 2003 dipilih karena pada tahun tersebut Amerika Serikat memulai fase intervensi militernya dengan invasi terhadap Irak, sedangkan tahun 2014 adalah tahun berakhirnya penelitian karena ISIS sebagai aktor insurgensi telah muncul sebagai aktor yang mapan dalam kancah peperangan di Irak. Cakupan penelitian meliputi politik domestik Amerika Serikat yang terkait dengan Irak, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, militer Amerika Serikat dan kondisi sosial-politik di Irak secara umum.

1.8 Sistematika Penelitian

Penulisan ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, operasionalisasi konsep dan metodologi penelitian. Bab kedua membahas intervensi militer Amerika Serikat secara lebih mendalam. Bab ketiga membahas dinamika perlawanan insurgensi dan bab keempat adalah analisis korelasi intervensi militer Amerika Serikat terhadap muncul dan berkembangnya ISIS. Terakhir adalah bab lima yaitu kesimpulan yang kemudian dituliskan daftar pustaka.